

**ARTIKULASI POLITIK DALAM GENDING PAKURMATAN MIYOS
DALEM SISKS PAKU BUWANA DAN KGPAA MANGKUNEGARA**

Laporan Penelitian



Oleh

**Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum.
NIP. 197103022003121001**

Dibiayai DIPA ISI Surakarta

Nomor SP DIPA 042.01.2.400903/2016

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

No. Kontrak:

Tanggal 16 Mei 2016

**INSTITUT SENI INDONESIA (ISI)
SURAKARTA
2016**

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian : **ARTIKULASI POLITIK DALAM
GENDING PAKURMATAN MIYOS
DALEM SISKS PAKU BUWANA DAN
KGPAA MANGKUNEGARA**

Peneliti

a. Nama Lengkap : Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum
b. NIP : 197103022003121001
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Jabatan Struktural : -
e. Fakultas/Jurusan : Seni Pertunjukan/Karawitan
f. Alamat Institusi : Jl. Ki Hajar Dewantara 19, Kentingan Jebres,
Surakarta 57126
g. Telpon/Faks/E-mail : (0271) 647658/ (0271) 646175/
direct@isi-ska.ac.id

Lama Penelitian : 6 bulan
Keseluruhan Pembiayaan : Rp 10.000.000,00

(Sepuluh Juta Rupiah)

Surakarta, 1 November 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan

Peneliti,

Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum.
NIP 196111111982032003

Danis Sugiyanto, S.Sn.,
NIP 197103022003121001

Menyetujui

Ketua LPPMP ISI Surakarta

Dr. RM. Pramutomo, M. Hum
NIP196810121995021001

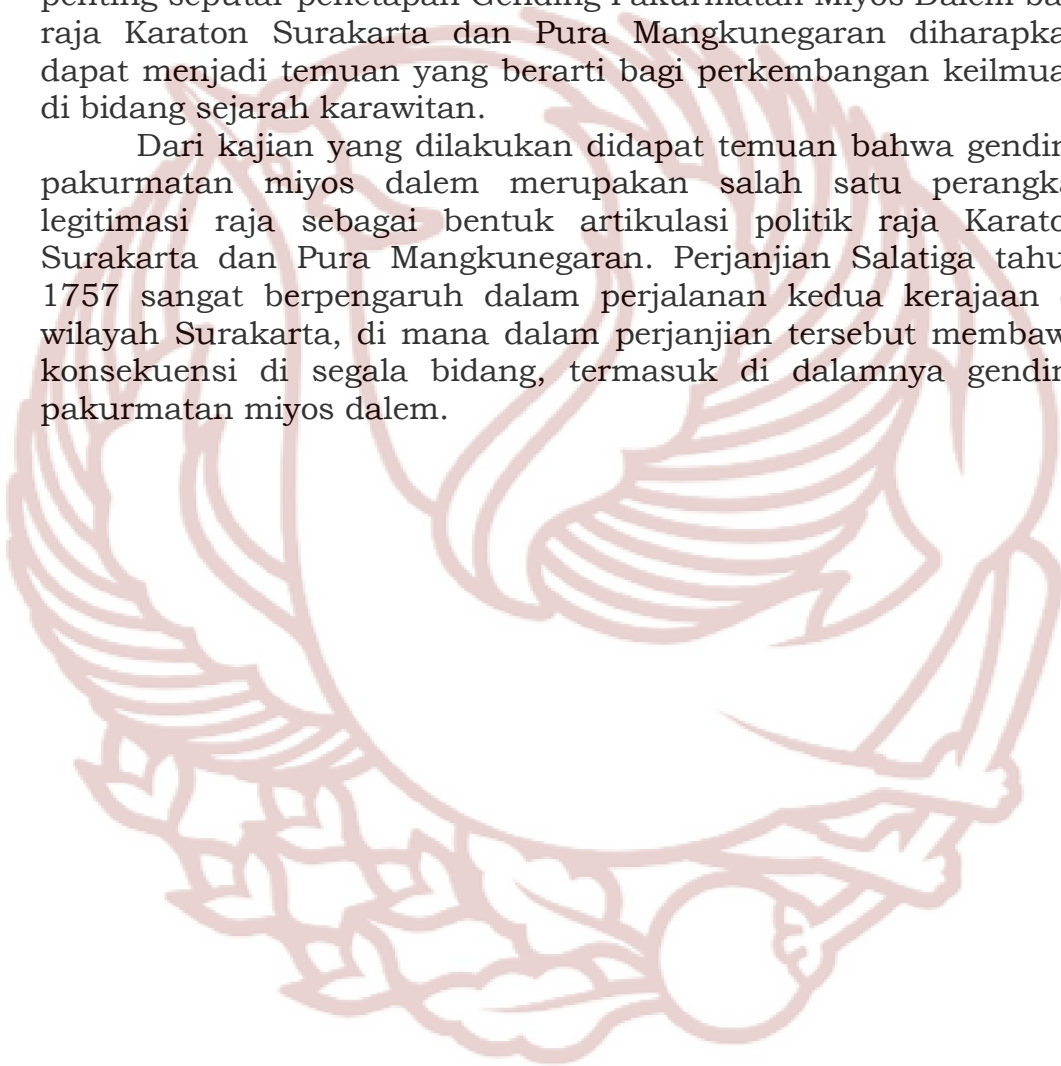
DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Abstrak.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III. METODE PENELITIAN	10
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	29

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta di balik penetapan Gending Pakurmatan Miyos Dalem bagi SISKS Paku Buwana serta KGPA Mangkunagara. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Peristiwa-peristiwa penting seputar penetapan Gending Pakurmatan Miyos Dalem bagi raja Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran diharapkan dapat menjadi temuan yang berarti bagi perkembangan keilmuan di bidang sejarah karawitan.

Dari kajian yang dilakukan didapat temuan bahwa gending pakurmatan miyos dalem merupakan salah satu perangkat legitimasi raja sebagai bentuk artikulasi politik raja Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Perjanjian Salatiga tahun 1757 sangat berpengaruh dalam perjalanan kedua kerajaan di wilayah Surakarta, di mana dalam perjanjian tersebut membawa konsekuensi di segala bidang, termasuk di dalamnya gending pakurmatan miyos dalem.



BAB I

PENDAHULUAN

Pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755, situasi politik Surakarta yang merupakan pecahan Mataram belum sepenuhnya stabil. Hal ini dikarenakan RM. Said belum diakui sebagai salah satu pewaris Mataram yang sah. Oleh karena itu RM. Said masih melanjutkan perjuangan hingga tercapai cita-cita yang diinginkan. merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai perubahan peta politik kerajaan Mataram Islam. Sejak Perjanjian Giyanti ditandatangani Paku Buwana III diberi kekuasaan atas wilayah Surakarta, dan VOC mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwana I yang menguasai separo wilayah Jawa Tengah.¹

Pengakuan pemerintah Hindia Belanda atas kedudukan Sultan Hamengkubuwana I belum menyelesaikan persoalan di kalangan istana. Salah satu keturunan Pangeran Mangkunagara (putra tertua Amangkurat IV) yaitu Raden Mas Said belum menghentikan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Namun demikian pada tahun 1757 Raden Mas Said menyadari bahwa peperangan tidak mungkin akan menyelesaikan persoalan perebutan tahta Mataram. Perundingan damai antara Raden Mas Said dengan pemerintah Hindia Belanda berlangsung pada tanggal 24 Pebruari 1757 di Grogol sebelah selatan Surakarta dilanjutkan

¹ Ricklefs, 1998, hal. 149.

dengan perundingan kedua pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga. Diperoleh kesepakatan Raden Mas Said mendapat wilayah kekuasaan yang meliputi Matesih, Keduwang, Nglaroh, dan Surakarta bagian tenggara. Perjuangan panjang Raden Mas Said pada akhirnya membuahkan hasil yang ditandai dengan berdirinya Pura Mangkunegaran.

Perjanjian Salatiga tahun 1757 pada akhirnya menandai perubahan di Kota Surakarta. Perubahan tersebut adalah munculnya Pura Mangkunegaran yang dipimpin oleh KGPAA Mangkunagara I. Dengan demikian di sejak saat itu di wilayah Kota Surakarta terdapat dua kerajaan yaitu Karaton Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwana III serta Pura Mangkunegaran. Perbedaan status antara Karaton Surakarta dengan Pura Mangkunegaran menyebabkan munculnya berbagai konsekuensi, salah satu konsekuensi tersebut adalah perbedaan strata antara Kasunanan dan Mangkunegaran.

Berdasarkan Perjanjian Salatiga yang ditandatangani di Desa Kalicacing Salatiga pada tanggal 17 Maret 1957 telah diatur kedudukan dan pangkat dari RM. Said sebagai *pangeran miji* dengan menerima hak-hak keistimewaan namun berkedudukan di bawah Sunan Paku Buwana. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati gelar yang dipakai adalah Pangeran Adipati Arya Mangkunegara.² Perbedaan kedudukan yang diterima oleh RM. Said inilah yang menyebabkan munculnya konsekuensi logis dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya penetapan Gending

² Iwan Santoso, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)*, Jakarta: Kompas, 2011, hal. 16.

Pakurmatan Miyos Dalem. Hal-hal yang mendasari penetapan Gending Pakurmatan Miyos Dalem sebagai bagian dari artikulasi politik kedua kerajaan di Surakarta inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Pemaparan Gending Pakurmatan Miyos Dalem di Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran pada akhirnya akan berhadapan dengan permasalahan teks dan konteks. Mendudukan peristiwa kesenian sebagai teks maka peristiwa tersebut harus dibaca dan ditafsirkan.³ Fenomena sosial budaya seperti makanan, mitos, ritual dapat dipandang sebagai kalimat atau teks yang bisa dibaca. Namun demikian fenomena sosial budaya sebagai sebuah teks atau kalimat harus memiliki gejala dengan makna tertentu yang menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran tertentu pula yang akhirnya menghasilkan makna.

Menafsirkan atau memberi tafsir fenomena budaya pada Gending Pakurmatan Miyos Dalem itu konsep interpretasi dari Clifford Geertz kiranya dapat dipinjam untuk menafsirkan Ladrang Sriaton Laras Pelog Pathet Barang sebagai Gending Pakurmatan Miyos Dalem SISKS Paku Buwana dan Ketawang Puspawarna Laras Slendro Pathet Manyura sebagai Gending Pakurmatan Miyos Dalem KGPA Mangkunegara. Geertz menyatakan bahwa untuk menganalisis kebudayaan bukan merupakan sebuah ilmu

³ Heddy Shri Ahimsa, *Ketika orang Jawa Nyeni*, Yogyakarta: Galang Press, 2000, hal. 402.

eksperimental untuk mencari hukum, melainkan sebuah ilmu yang bersifat interpretatif untuk mencari sebuah makna.⁴

Selain membaca “teks” kedua Gending Pakurmatan Miyos Dalem tersebut, pendekatan kontekstual juga digunakan untuk mendekati berbagai peristiwa di seputar karya gending tersebut. Pendekatan kontekstual dirasa penting digunakan karena pendekatan ini sangat berguna untuk mengungkapkan berbagai faktor dan latar belakang terciptanya Ladrang Srikaton Laras Pelog Pathet Barang dan Ketawang Puspawarna Laras Slendro Pathet Manyura.

Penciptaan gending juga sangat berkaitan dengan fungsi gending yang diciptakan. Teori fungsi yang berkaitan dengan kebudayaan diungkapkan oleh Malinowski yang menyatakan bahwa semua aktivitas kebudayaan pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan rangkaian kebutuhan naluri manusia berkaitan dengan aspek kehidupannya. Aktivitas kebudayaan manusia akhirnya menjadi bervariasi dengan berbagai kombinasi dari beberapa *human needs*.⁵ Kesenian termasuk di dalamnya karawitan yang merupakan bagian dari kebudayaan tentu saja memiliki nilai guna.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Studi ini bermaksud untuk mengungkap sejumlah peristiwa karawitan Karaton dengan Mangkunegaran, serta faktor-

⁴ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992, hal. 5.

⁵ Malinowski, dalam Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press, 1987, hal. 32.

faktor yang melatar belakangnya. Secara umum, penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menambah wawasan dalam ranah ilmu pengetahuan di bidang seni karawitan Jawa khususnya gaya Surakarta. Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan kontekstual dibalik karya karawitan yaitu Gending Pakurmatan Miyos Dalem baik di Karaton Surakarta maupun Pura Mangkunegaran yang selama ini belum terungkap.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia keilmuan karawitan Jawa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat akademis (dosen dan mahasiswa), seniman praktisi, sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang karawitan khususnya mengenai sejarah karawitan Gaya Surakarta. Target lain dari studi ini adalah juga akan menggali materi-materi khususnya Gending Pakurmatan Miyos Dalem sebagai tambahan referensi pustaka pandang-dengar di perpustakaan lembaga ISI Surakarta. Terjawabnya seluruh permasalahan yang dibentangkan dalam studi ini, diharapkan berbagai persoalan yang melingkupi Gending Pakurmatan Miyos Dalem dapat terpecahkan dan tersusun secara sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Topik tentang Karawitan Gaya Surakarta serta gending-gending yang dihasilkan pada masa kerajaan sudah banyak ditulis, baik yang menggunakan sudut pandang sejarah, sosiologi, antropologi, budaya musik karaton, atau pun pendekatan yang lain. Namun tulisan atau buku-buku itu belum memaparkan secara spesifik tentang artikulasi politik beserta faktor-faktor yang mengitarinya. Buku dengan judul Jawa: *On the Subject of Jawa* (2003) tulisan John Pemberton, *Menyurat Yang Silam Menggurat yang Menjelang* tulisan Nancy Florida, *Keraton dan Kompeni* tulisan Vincent J.H. Houben merupakan buku-buku yang menggunakan Karaton Surakarta sebagai obyek kajian, akan tetapi dalam buku-buku itu belum ada pembahasan secara khusus tentang rekonsiliasi politik.

Iwan Santoso dalam bukunya *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)* mengungkapkan bahwa perjuangan RM. Said hingga mendapatkan kedudukan sebagai Mangkunegara I merupakan tonggak munculnya legiun Mangkunegaran. Di sisi lain keberhasilan perjuangan RM. Said mendapatkan kedudukan memunculkan berbagai konsekuensi politik berkaitan dengan kedudukan dan statusnya terhadap kekuasaan Sunan Paku Buwana penguasa Karaton Surakarta. Buku ini membahas berbagai hal tentang legiun atau pasukan Mangkunegaran,

sehingga persoalan artikulasi politik tidak ditemukan dalam buku ini. Namun demikian berbagai informasi penting seputar kebijakan politik penguasa Mangkunegaran dapat ditemukan dalam buku ini.

Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran tulisan Wasino merupakan sumber tertulis yang banyak mengupas tentang kebijakan perekonomian penguasa Mangkunegaran. Buku ini juga tidak membahas kebijakan di bidang politik kaitannya dengan artikulasi politik. Namun demikian berbagai informasi kebijakan ekonomi penguasa Mangkunegaran setidaknya dapat digunakan sebagai acuan dalam mencari jawab seputar kedudukan Mangkunegaran di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan politik Mangkunegaran.

Darsiti Soeratman dalam bukunya *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta:1830-1939* baik yang diterbitkan tahun 1989 maupun tahun 2000 telah membahas secara rinci tentang raja, kebiasaan sehari-hari, hubungan sosial antar penghuni kraton, serta beberapa upacara tradisi kraton, termasuk upacara Sekaten. Namun rekonsiliasi politik belum dibahas secara khusus. Dalam buku ini Sekaten Darsiti Soeratman lebih banyak membahas tentang upacara kerajaan baik peserta upacara, maupun perangkat yang digunakan dalam upacara-upacara kerajaan.

Serat Sri Karongron tulisan Raden Ngabehi Purbadipura merupakan sebuah karya tulis yang sangat berharga merupakan salah satu sumber tertulis tentang kehidupan karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X. *Serat Sri Karongron*

mendeskrripsikan berbagai upacara tradisi kenegaraan maupun upacara tradisi keluarga. Dalam tulisan itu juga disertakan perangkat-perangkat gamelan yang digunakan. Akan tetapi Serat Sri Karongron tidak mendeskripsikan Gending Pakurmatan secara khusus. Namun demikian beberapa informasi berharga dapat diambil dari Serat Sri Karongron untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Raja Di Alam Republik (2000) tulisan Bram Setiadi, dkk. merupakan sebuah buku yang memuat informasi berharga tentang pandangan Paku Buwana XII sebagai seorang raja yang hidup di alam republik yang sangat jauh berbeda situasinya dengan masa kerajaan. Paku Buwana XII menyebut bahwa pada masa sekarang karaton bukan lagi sebagai pusat politik atau pusat kekuasaan, tetapi karaton harus ditempatkan dalam kerangka pelestarian, pengemban dan pengembang kebudayaan. Informasi dalam buku ini setidaknya dapat digunakan sebagai informasi awal bagaimana posisi raja Karaton Surakarta di kancah politik pasca kemerdekaan.

Buku lain yang secara khusus membahas tentang raja Surakarta diantaranya *Raja, Priyayi, dan Kawula* (2004) tulisan Kuntowijoyo. Keadaan, perilaku, dan bawah sadar kolektif Paku Buwana dibahas oleh Kuntowijoyo, pembahasan tentang penggunaan simbol-simbol budaya termasuk gending oleh Paku Buwana X menjadi salah satu data penting untuk mengungkap kekuatan di balik simbol-simbol budaya yang digunakan Paku Buwana X.

Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Bagi Raja-Raja Mataram (2002) tulisan G. Moedjanto. Buku ini membahas bagaimana raja-raja Mataram menerapkan serta memperlihatkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Pada akhirnya Moedjanto menyebut arti penting sebuah legitimasi bagi seorang raja. Meskipun tidak membahas tentang artikulasi politik, namun buku ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana konsep kekuasaan raja-raja Mataram serta usaha raja Mataram dalam mempertahankan legitimasinya.

Karawitan Jawa Masa Pemerintahan PB X: Perspektif Historis dan Teoretis (2006) hasil tulisan Waridi telah menjelaskan secara rinci keberadaan karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Peran penting karawitan sebagai alat legitimasi menjadi informasi yang sangat berharga untuk melihat bagaimana peran penting karawitan karaton dalam wilayah politik kekuasaan pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Seperti halnya buku-buku yang membicarakan Karaton Surakarta, buku ini juga belum membahas artikuasi politik.

Bothekan Karawitan I (2000) yang ditulis oleh Rahayu Supanggah merupakan sumber informasi berharga tentang fungsi perangkat gamelan serta hal-hal yang berkaitan dengan konsep musikal karawitan. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan artikulasi politik, informasi dalam buku ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengurai peran gamelan dan gending sebagai alat legitimasi kekuasaan. Selain itu buku tulisan Rustopo, Slamet Suparno, serta Waridi yang berjudul *Kehidupan*

Karawitan Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X, Mangkunagara IV, dan Informasi Oral (2007) juga memuat informasi berharga seputar kehidupan karawitan di Karaton Surakarta. Informasi tentang kehidupan karawitan karaton dalam buku ini sangat membantu untuk melacak dan membandingkan dengan informasi dari sumber lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya menggali, mengkonseptualisasi, mengategorisasi, dan melakukan penafsiran terhadap data yang ada.

Penelitian ini dilakukan melalui dua cara dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, dan studi pustaka. Data yang bersifat informasi lisan diupayakan lewat serangkaian wawancara dengan nara sumber terpilih, baik dari Karaton maupun Mangkunegaran. Para narasumber dipilih dari orang-orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Mereka adalah *sentana dalem*, budayawan, serta kerabat Karaton. Narasumber tersebut antara lain: GPH. Puger, selaku *pengageng Sana Pustaka* Karaton Surakarta. BRM. Bambang Irawan, salah seorang *sentana dalem*. Narasumber juga dipilih dari luar tembok Karaton dan Mangkunegaran. Dari akademisi antara lain: Rahayu Supanggah, Darsono, A.L Suwardi, Sukamso, Suraji, dan Rusdiyantoro.

Studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan karawitan Karaton Surakarta dan Mangkunegaran. Aktivitas ini dilakukan di perpustakaan yang ada di lingkungan kampus ISI Surakarta, seperti perpustakaan pusat, perpustakaan

pasca sarjana, maupun perpustakaan di tingkat jurusan. Sedangkan studi pustaka di luar lingkungan kampus ISI Surakarta dilaksanakan di Sana Pustaka, Radya Pustaka, dan Reksha Pustaka. Metode ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai masalah yang diteliti sekaligus membandingkan informasi-informasi yang diperoleh. Studi pustaka juga dilakukan dengan mencari sumber-sumber tertulis baik buku tercetak, manuskrip, artikel dalam majalah dan surat kabar, laporan penelitian dan sumber tertulis lainnya merupakan sumber data yang sangat berharga.

Prinsip memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan penelitian sangat diperlukan berkaitan dengan banyaknya data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pekerjaan mereduksi dan analisis data yang diperoleh di lapangan dilakukan seawal mungkin dengan tujuan kekurangan-kekurangan data dapat segera diketahui dan dicari jalan keluarnya dengan mencari lagi di lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis, dikelompokkan, dan pada tahap akhir adalah penulisan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Situasi Politik Tahun 1755-1757

Tahun 1755 merupakan tahun dimulainya babak baru bagi dinasti Mataram. Pada tahun tersebut Perjanjian Giyanti yang berisi pembagian bumi Mataram menjadi dua bagian ditandatangani. Mataram dipecah menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk kesepakatan pihak VOC Belanda dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Demi keuntungan pribadi Pangeran Mangkubumi membuat pilihan untuk menyebrang dari kelompok pemberontak, dan bergabung dengan pemegang kekuasaan dalam melawan pemberontakan yang dilakukan Pangeran Sambernyawa.

Perjanjian Giyanti diawali dengan kunjungan Nicolash Hartingh menemui Pangeran Mangkubumi pada tanggal 10 September 1754. Pertemuan tertutup hanya dihadiri beberapa orang. Selain Nicolash Hartingh, tentu saja ada Pangeran Mangkubumi beserta Pangeran Notokusumo dan juga Tumenggung Ronggo. Perundingan ini tidak menemui kesepakatan

karena Pangeran Mangkubumi menolak usulan Nicolas Hartingh yang ingin memberikan wilayah Mataram sebelah timur kepada Mangkubumi. Sampai pada akhirnya, pada awal tahun 1755 perjanjian pembagian kekuasaan Mataram antara Sunan Paku Buwana III dan Pangeran Mangkubumi ditandatangani di Desa Giyanti dan terkenal dengan sebutan Perjanjian Giyanti.

Pasca Perjanjian Giyanti VOC berharap situasi keamanan di wilayah Mataram berangsur pulih. Namun dikarenakan Raden Mas Said tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut, situasi keamanan yang diharapkan oleh VOC tidak terwujud dikarenakan Raden Mas Said masih menggelorakan pemberontakan kepada VOC. Dapat dikatakan pasca Perjanjian Giyanti kerusuhan terus berlangsung, hal ini karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut serta dalam perundingan yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Giyanti. Dalam Perjanjian Giyanti ini Pangeran Sambernyawa ialah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan salah satu upaya untuk memadamkan pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said. Dengan situasi keamanan yang belum terjamin, pihak VOC akhirnya mengajak Raden Mas Said ke meja perundingan.

Pada awal tahun 1757, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia menulis surat kepada Pakubuwono III di Surakarta,

Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Surat tersebut berisi undangan agar ketiganya bertemu di Salatiga untuk mengadakan perundingan. 17 Maret 1757 di dusun Kalicacing, Salatiga, perundingan tersebut dapat terlaksana. Menurut buku Babad KGPAA.Mangkunegara I, susunan formasi para peserta perundingan adalah sebagai berikut : Nicholas Hartingh sebagai wakil dari Gubernur Jenderal Belanda, yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator duduk di tengah, diapit oleh Pakubuwono III, di sebelah kanan dan Hamengkubuwono I di sebelah kiri. Di hadapan mereka duduk Pangeran Sambernyawa. Perundingan ini disaksikan oleh kepala perwakilan VOC dan kedua patih, baik dari Surakarta maupun Yogyakarta, yaitu Mangkupraja dan Suryanegara.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pangeran Sambernyawa di angkat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara I
2. Pangeran Sambernyawa berhak menguasai tanah seluas 4000 karya, serta semua daerah yang pernah dilewati selama mengadakan pemberontakan dan menjalankan roda pemerintahannya.

3. Pangeran Sambernyawa berhak mendirikan sebuah istana atau pura sebagai pusat pemerintahannya di Surakarta, tetapi dengan syarat :

- Dilarang membuat singgasana
- Dilarang membuat alun-alun dengan beringin kurung
- Dilarang membuat Sitihinggil
- Dilarang menjatuhkan hukuman mati

Istana dan Praja Mangkunegaran selanjutnya di kenal dengan nama Pura Mangkunegaran. Kesepakatan tersebut di atas di kenal dengan nama Perjanjian Salatiga.

Salatiga merupakan perjanjian yang membagi Surakarta menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Perjanjian ini merupakan upaya penyelesaian dari serangkaian konflik perebutan kekuasaan keturunan Dinasti Mataram. Dengan berat hati Hamengku Buwono I dan Paku Buwono III akhirnya merelakan beberapa wilayahnya untuk Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa). Ngawen di wilayah Yogyakarta dan sebagian Surakarta menjadi daerah kekuasaan dari Pangeran Sambernyawa. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa), Sultan Paku Buwono III, Sultan Hamengku Buwono I , dan VOC di gedung VOC.

Pura Mangkunegaran sejak ditetapkan sebagai wilayah yang merdeka sejak Perjanjian Salatiga ditandatangani pada

akhirnya membutuhkan berbagai instrumen atau perangkat yang dapat dijadikan sebagai identitas kerajaan. Identitas sangat diperlukan bagi Pura Mangkunegaran mengingat Pura Mangkunegaran merupakan pecahan wilayah Karaton Surakarta yang muncul setelah perpecahan Mataram. Karaton Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang merupakan pecahan dari Mataram tentu telah memiliki identitas dikarenakan kedua kerajaan tersebut lebih dulu muncul jika dibandingkan dengan Pura Mangkunegaran.

B. Identitas Kerajaan

Sebuah kerajaan tentu memerlukan identitas sebagai penanda kerajaan yang berfungsi sebagai pembeda antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Hal ini dikarenakan identitas dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi individu maupun kelompok untuk mengenalkan individu atau kelompok tersebut kepada orang lain atau masyarakat luas. Demikian juga dengan kerajaan, identitas digunakan sebagai alat untuk mengenalkan kepada khalayak segala hal tentang kerajaan dengan segala dinamika kehidupannya.

Dapat dikatakan bahwa identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk

bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka. Widayanti (2009, 14-15) menyebutkan bahwa ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembentukan identitas, yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme.

1. Primordialisme

Pendekatan ini mensyaratkan proses pembentukan identitas yang diperoleh secara alamiah. Salah satu proses pembentukan identitas secara alamiah adalah identitas yang didapat karena keturunan. Dalam konteks kerajaan, pendekatan pembentukan identitas tipe primordialisme tentu saja tidak melalui proses yang rumit. Hal ini dikarenakan kelompok atau individu yang sudah diakui sebagai bagian dari kerajaan, tentu secara otomatis akan mendapatkan identitasnya.

2. Konstruktivisme.

Pembentukan identitas dengan pendekatan konstruktivisme merupakan pembentukan identitas yang dibentuk dari proses sosial yang kompleks. Pendekatan ini lebih mengarah pada pembentukan identitas secara kelompok. Pada awalnya sebuah kelompok yang baru terbentuk tentu saja belum memiliki identitas. Setelah

melalui proses yang panjang pada akhirnya sebuah kelompok melalui berbagai proses dan pembicaraan pada akhirnya disepakati bahwa kelompok tersebut menetapkan identitas. Dengan kata lain identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.

3. Instrumentalisme

Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Pembentukan identitas dengan pendekatan instrumentalisme ini agaknya menjadi pilihan bagi kedua kerajaan di wilayah Surakarta yaitu Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran.

Dengan pendekatan pembentukan seperti tersebut di atas, setiap orang, komunitas, maupun kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri identitasnya. Pembentukan identitas pada akhirnya mengarah pada bagaimana individu atau kelompok masyarakat menggali berbagai jalan untuk menentukan identitasnya yang akhirnya mengarah kepada politik identitas. Dengan kata lain politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas.

Politik identitas secara pengertian berawal dari dua kata yaitu politik dan identitas. Pertama kita melihat dari pengertian politik terlebih dahulu yaitu secara etimologi politik berasal dari

bahasa Yunani yaitu *Politeia*, atau *polis* yang artinya adalah negara atau kota. Kemudian menurut Miriam Budiardjo (2002:8), politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau nagara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kemudian yang kedua adalah pengertian identitas, secara etimologi identitas berasal dari kata *identity* yang artinya sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalnya suku, etnis, agama dan yang membedakan dengan yang lainnya. Dua kata tersebut akhirnya membentuk idiom baru yang disebut dengan politik identitas.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Menurut Sri Astuti Buchari (2014:20) politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan yang dipakai suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan

kelompok tersebut. Politik identitas pada dasarnya sering muncul ketika terjadi adanya ketidakadilan atau biasanya hal tersebut juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hal tersebut terjadi karena merasa adanya kesamaan karakteristik atau etnis serta kesukuan suatu kelompok tersebut.

Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran telah menciptakan identitas mereka sendiri sejak kedua kerajaan tersebut berdiri. Hal ini bisa dilihat pada penamaan Karaton untuk Surakarta dan Pura untuk Mangkunegaran. Kedua hal tersebut telah menunjukkan identitas masing-masing kerajaan. Antara Karaton dan Pura keduanya memiliki implikasi yang berbeda, terutama dalam bidang politik kerajaan. Dengan identitas yang dimiliki masing-masing kerajaan, pada akhirnya kedua kerajaan sampai pada tahap bagaimana menjadikan identitas-identitas tersebut sebagai bentuk artikulasi politik.

C. Identitas Kerajaan Sebagai Media Artikulasi Politik

Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran pada akhirnya menjadi kerajaan mandiri lengkap dengan segala atributnya. Meskipun dalam beberapa hal, Pura Mangkunegaran harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam

Perjanjian Salatiga, namun Pura Mangkunegaran mampu menyikapi aturan-aturan tersebut sehingga memunculkan identitas Pura Mangkunegaran yang berbeda dengan Karaton Surakarta. Hingga dapat dikatakan meskipun pusat pemerintahan kedua kerajaan tersebut sdaling berdekatan, namun kedua kerajaan pecahan Dinasti Mataram tersebut memiliki identitas yang berbeda.

Identitas suatu kerajaan erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan seorang raja. Identitas yang kuat akan berbanding lurus dengan kuatnya legitimasi seorang raja. Seorang raja tentu menginginkan kedudukannya diakui oleh semua orang, hingga semua upaya ditempuh untuk meyakinkan bahwa raja yang bertahta adalah orang yang paling berhak menduduki singgasana kerajaan. Ungkapan-ungkapan dalam kesusastraan Jawa yang melukiskan raja sebagai *ratu gung binathara* (raja yang didewakan), *ber bandha- ber bandhu* (kaya harta benda maupun kerabat), *mbaudhendha nyakrawati* (memiliki kekuatan untuk menghukum dan menguasai dunia) menunjukkan bahwa kedudukan raja berada di atas segalanya(Daryanto, 2008: 39) Dengan demikian seorang raja sangat memerlukan perangkat yang dapat digunakan sebagai peneguh kekuasaannya. Salah satu identitas yang dapat digunakan sebagai peneguh kekuasaan atau

sebagai artikulasi politik seorang raja adalah gending pakurmatan miyos dalem.

D. Artikulasi Politik Dalam Gending Pakurmatan Miyos Dalem

Keberadaan kesenian-kesenian dan hasil kebudayaan yang bersumber dari istana merupakan salah satu unsur penegak wibawa raja. Dapat dikatakan bahwa konsep estetika seni pertunjukan yang hidup dan berkembang di istana Jawa merupakan manifestasi dari ideologi raja.(Bandem, 2001: 39). Karawitan merupakan salah satu produk seni pertunjukan istana dengan berbagai kaidah yang menyertainya, dapat dimaknai sebagai salah satu unsur penegak wibawa raja, atau dengan kata lain melalui karawitan raja berusaha menunjukkan legitimasi kekuasaannya kepada masyarakat luas.

Salah satu identitas sekaligus artikulasi politik yang digunakan oleh raja Karaton Surakarta dan Pura Mangkunegaran adalah gending *pakurmatan miyos dalem*. Gending pakurmatan miyos dalem merupakan gending yang digunakan untuk menghormati kedatangan raja, artinya setiap raja hadir di suatu tempat, maka pengrawit wajib membunyikan gending tersebut. Oleh karena gending pakurmatan merupakan identitas masing-

masing kerajaan, maka kedua kerajaan di wilayah Surakarta tersebut memiliki gending pakurmatan miyos dalem yang berbeda. Karaton Surakarta menggunakan Ladrang Sri Katon laras pelog pathet barang, sedangkan Pura Mangkunegaran menggunakan Ketawang Puspawarna laras slendro pathet manyura.

Ladrang Sri Katon laras pelog pathet barang dan Ketawang Puspawarna laras slendro pathet manyura yang digunakan sebagai gending pakurmatan miyos dalem erat kaitannya dengan status masing-masing kerajaan. Hal ini tentu berdasarkan kesepakatan pada Perjanjian Salatiga tahun 1757. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa kedudukan Pura Mangkunegaran tidak lebih tinggi dari Karaton Surakarta.

Perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said dengan pemerintah Hindia Belanda berlangsung pada tanggal 24 Februari 1757 di Grogol sebelah selatan Surakarta, dilanjutkan dengan perundingan kedua pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga. Dalam perundingan tersebut diperoleh kesepakatan, bahwa Raden Mas Said mendapat wilayah kekuasaan yang meliputi Matesih, Keduwang, Nglaroh, dan Surakarta bagian tenggara. Perjuangan panjang Raden Mas Said pada akhirnya membuahkan hasil yang ditandai dengan berdirinya Pura Mangkunegaran.

Perjanjian Salatiga tahun 1757 pada akhirnya menandai perubahan di Kota Surakarta. Perubahan tersebut adalah munculnya Pura Mangkunegaran yang dipimpin oleh KGPAA Mangkunagara I. Dengan demikian di sejak saat itu di wilayah Kota Surakarta terdapat dua kerajaan yaitu Karaton Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwana III serta Pura Mangkunegaran. Perbedaan status antara Karaton Surakarta dengan Pura Mangkunegaran menyebabkan munculnya berbagai konsekuensi, diantaranya adalah munculnya beberapa kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak. Kesepakatan itu diantaranya adalah Pura Mangkunegaran tidak boleh memiliki gajah, alun-alun, dan beringin kurung. Adapun di bidang kesenian Pura Mangkunegaran tidak boleh memiliki gamelan Sekaten. Dengan kata lain, kesepakatan politik antara Karaton Surakarta dengan Mangkunegaran dibuat berdasarkan Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said terhadap Sunan Pakubuwana III, penguasa Kasunanan Surakarta yang telah terpecah akibat Perjanjian Giyanti, dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Salatiga, Raden Mas Said diberi hak untuk menguasai wilayah timur dan selatan sisa wilayah Mataram sebelah timur. Jumlah wilayah ini secara relatif adalah

49% wilayah Kasunanan Surakarta setelah tahun 1830, yaitu pada saat berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Wilayah itu kini mencakup bagian utara Kota Surakarta (Kecamatan Banjarsari, Surakarta), seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Secara rinci wilayah kekuasaan Mangkunegaran meliputi Kaduwung, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Hariboyo, Honggoboyo, Sembuyang, Gunung Kidul, Pajang, dan sebelah utara jalan Kartasura-Sala.⁶

Berdirinya Pura Mangkunegaran pada akhirnya menambah satu kerajaan di wilayah Mataram, selanjutnya melalui intervensi kompeni, kosmos lama yaitu Mataram telah dibagi menjadi tiga mini kosmos, yaitu “sumbu semesta” (Paku Buwana), “pemangku semesta” (Hamengkubuwana), dan pangkuan negara (Mangkunegara). Ketiga mini kosmos tersebut pada akhirnya terlibat intrik yang berbelit-belit dan politik diplomasi perkawinan.⁷

Berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Salatiga, maka ketika Karaton Surakarta menggunakan struktur ldrang sebagai gending pakurmatan miyos dalem, maka Pura Mangkunegaran

⁶ Yayasan Mangadeg Surakarta.. *Pangeran Samber Nyawa, Ringkasan Sejarah Perjuangannya*. 1989. Surakarta. hal. 31

⁷ John Pemberton. *Jawa: On The Subject of Java*. 2003. Yogyakarta. Mata Bangsa. Hal. 55.

harus menggunakan struktur di bawah ladrang, dalam hal ini Pura Mangkunegaran memilih struktur ketawang. Pemilihan struktur gending dengan struktur yang berbeda memiliki makna bahwa gending pakurmatan miyos dalem merupakan bagian dari artikulasi politik bahwasanya Karaton Surakarta berkedudukan lebih tinggi dari Pura Mangkunegaran.

Artikulasi politik dalam gending pakurmatan miyos dalem juga dapat dilihat dari syair atau cakepan gending pakurmatan miyos dalem masing-masing kerajaan. Cakepan kedua gending pakurmatan miyos dalem kedua kerajaan selengkapnya sebagai berikut:

Cakepan Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang

Humiyos Kanjeng Sang Nata

Saking ing Prabasuyasa

Ginarbeg ing upacara

Kahampil srimpi badhaya

Myang manggung ketanggung jaka

Palara-lara sadaya

Sri Nata ngrasuk busana

Kaprabon tuhu respatya

Sembada bisa busana

Sanggya kang rinasuk endah

Sri Naranata sudibya

Hing tyas ngadil paramarta

Weninging tyas wicaksana

Putus pratitis ing sabda

Prawira hambeg utama

Temen kretarta jatmika

Cakepan Ketawang Puspawarna

Kembang kencur kacaryan hagung cinatur

Sedhet kang sarira, gandhes ing wiraga

Kewes yeng ngandika, hangengayut jiwa

Kembang blimbing pinethik bali ing tebing

Maya-maya sira, wong pindha mustika

Turuning kusuma pathining wanodya

Kembang duren sinawang sinambi leren

Dalongop kang warna sumeh semunira

Luwes pamicara hangenganyut driya

Kembang aren tumungkul aneng duren

Sandunge kula mulat ing paduka

Hanganggit puspita, temahan wiyoga

Berdasarkan terjemahan bebas kedua syair gending pakurmatan kedua kerajaan. Terlihat bahwa Karaton Surakarta lebih menonjol dalam mengartikulasikan kekuasaan rajanya. Sedangkan Pura Mangkunegaran tidak secara eksplisit menunjukkan legitimasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa Putra, H.S. *Strukturalisme Levi-strauss: Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta, 2001.

Ahimsa-Putra, H.S. "Wacana Seni Dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual dan Post-Modernistis" dalam *Ketika Orang Jawa Nyeni*. Yogyakarta: Galang Press, 1999.

Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Darsiti Soeratman.. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta. 1890-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. 2000

Darsono. *Cokrodiharjo dan Sunarto Cipto Suwarso: Pengrawit Unggulan Luar Tembok Kraton*. Surakarta: Citra Etnika Surakarta, 2002.

I Made Bandem, "Drama Tari Gambuh: Sebuah Cerminan Kehidupan Istana", dalam *Jurnal Kebudayaan Kabanaran* Vol. I. September 2001. hal 39

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Mloyowidodo. *Gendhing-Gendhing Gaya Surakarta*. Surakarta: ASKI, 1976.

Pradjapangrawit. *Serat Sujarah Utawi Riwayating Gamelan: Wedhapradangga (Serat Saking Gote)*. Surakarta: STSI Press, 1990.

Rustopo. "Keberadaan Karawitan di Karaton Kasunanan Surakarta Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X Menurut Serat Sri Karongron. Laporan Penelitian Surakarta: Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, 1994.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Santoso, Iwan. *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)*. Jakarta. Kompas. 2011

Sumarsam. *Gamelan: Inteaksi Budaya dan Perkembangan musikal di Jawa*. Yogtakarta: Pusaka Pelajar: 2003.

Supanggih, Rahayu. "Beberapa Pokok Pikiran Tentang Garap". Makalah disajikan dalam diskusi mahasiswa dan dosen ASKI Surakarta, 1983.

_____. *Bothèkan Karawitan I*. Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2002.

Warsadiningrat. *Serat Sesorah Gamelan*. Surakarta, 1920.

Waridi. *Martopangrawit Empu Karawitan Gaya Surakarta*. Yogyakarta: Mahavira, 2001.

_____. *Karawitan Jawa Masa Pemerintahan PB X: Perspektif Historis dan Teoritis*. Surakarta: ISI Press, 2006.

Wasino. *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS, 2008

Widayanti, Titik. *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: Research Center For Politics And Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM. 2009.

Zainudin Fananie. *Pandangan Dunia KGPAH Hamangkoenagoro I dalam Babad Tutur: Sebuah Restrukturasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1994.